

**PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENUMBUHAN IKLIM USAHA OLEH
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SLEMAN**

Lara Ayu Lestari, Agnes Dellaneira Spestira, Augustin Rina Herawati, Kismartini

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro

Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta

Korespondensi penulis: Laraayulestari19@gmail.com, agnes.dellaneira2016@student.uny.ac.id,

Augustin.rina@gmail.com, Kis_martini@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman serta faktor pendukung dan penghambatnya. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sudah berjalan optimal.. Pada aspek sarana dan prasarana menyediakan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Pada aspek informasi usaha menerapkan asas keterbukaan informasi publik dan sistem satu data UMKM. Pada aspek kemitraan membentuk forum kemitraan dan forum komunikasi (Forkom) UMKM. Pada aspek perizinan usaha mempermudah pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui *One Single Submission (OSS)*. Pada aspek promosi dagang memberikan fasilitasi pameran dan bantuan biaya sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada aspek dukungan kelembagaan membentuk PLUT Sleman. Pada aspek kesempatan berusaha menyediakan tempat usaha dan *brainstorming* kewirausahaan. Faktor pendukung pemberdayaan UMKM meliputi kesiapan pelatihan UMKM, bantuan modal, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran dan SDM.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Menengah dan Kecil Menengah, Iklim Usaha

Abstract

This study aims to look at the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through the development of a business climate by the Office of Cooperatives and SMEs in Sleman Regency and the supporting and inhibiting factors. The research design is descriptive qualitative with data techniques using observation, interview, and documentation techniques. The technique of checking the validity of the data used source triangulation technique. The data analysis technique used interactive data analysis by Miles and Huberman's model.

The results showed that overall the empowerment of MSMEs through the development of the business climate carried out by the Office of Cooperatives and SMEs in Sleman Regency has been running optimally. On the aspect of providing Capital Strengthening Fund (DPM) assistance and holding MSME meetings with capital distributors. In the aspect of facilities and infrastructure, it provides an Integrated Business Service Center (PLUT) building. In the business information aspect, it applies to public information disclosure and a single data system for MSMEs. On the partnership aspect, forming a partnership forum and communication forum (Forkom) of UMKM. In the aspect of business licensing, it makes it easier to obtain Micro and Small Business Permits (IUMK) through One Single Submission (OSS). In the aspect of trade promotion, it provides exhibition facilities and assistance with the cost of certification of Intellectual Property Rights (IPR). In the aspect of institutional support for PLUT Sleman. At the right try to provide a place of business and exchange entrepreneurial ideas. Supporting factors for the empowerment of MSMEs include Human Resources (HR), capital assistance, and government policies. Meanwhile, the inhibiting factors include limited budget and human resources.

Key Words: Empowerment, UMK, Business Climate Growth

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kebebasan untuk masing-masing daerah agar mewujudkan kemandiriannya. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah berkewajiban mendorong masyarakat dalam kegiatan usaha dengan memperkuat sistem dan kelembagaan. Salah satu penunjang pengembangan perekonomian adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting. Mengingat krisis ekonomi yang telah dihadapi negara Indonesia beberapa waktu yang lalu, UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut jika dibandingkan dengan usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktivitasnya. Menurut data statistik terkait perkembangan periode 1997-2003, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta sampai dengan 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012 (*Perkembangan UMKM Pada Priode 1997-2003*, n.d.).

Di era ekonomi digital, UMKM harus memiliki kapabilitas dalam mengoperasionalkan teknologi semaksimal mungkin sehingga mereka mampu berkembang, *sustainable*, dan menyajikan berbagai produk inovatif yang mampu bersaing dalam pasar. Dengan adanya berbagai teknologi digital, akses pemasaran bagi pelaku UMKM menjadi lebih murah, dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah. Kondisi ini memacu UMKM untuk mengembangkan produknya ke arah yang

lebih unggul, berstandar tinggi, dan berdaya saing global.

Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus bekerjasama dalam memberdayakan UMKM dengan berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan UMKM. Pemerintah berkomitmen seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. UMKM juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil.

Berdasarkan data dari Paparan Rakornas Yogyakarta 2018 dalam Suherningtyas (2019) mengenai sebaran UMKM di DIY pada tahun 2017, persentase jumlah UMKM di setiap kabupaten/ kota adalah sebagai berikut. Persentase UMKM Kabupaten Bantul (26%), Kabupaten Gunungkidul (22%), Kabupaten Kulon Progo (20%), Kabupaten Sleman (18%), dan Kota Yogyakarta (14%) (Sumber: www.depkop.go.id, diakses pada 22 Desember 2020, pukul 16.00). Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Sleman memiliki jumlah UMKM yang rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Namun, Kabupaten Sleman masih lebih unggul sebesar 2% jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Sleman memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Jika ditinjau dari kondisi kependudukan dimana banyak usia produktif.

Jika ditinjau dari kondisi geografis, Kabupaten Sleman berada pada lokasi yang strategis karena berada pada perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah (Suherningtyas, 2019). Permasalahan UMKM di Kabupaten Sleman diantaranya adalah terkait dengan promosi dagang, pendanaan, dan izin usaha. Permasalahan dalam aspek promosi dagang yaitu mayoritas para pelaku UMKM belum memiliki daya saing yaitu belum memperhatikan masalah pemasaran, pengemasan maupun manajemen yang baik (krjogja.com, 2019). Pelaku usaha yang mendaftarkan HAKI juga sedikit, padahal pemerintah sudah memiliki anggaran untuk membantu para pelaku usaha (Jogja.Tribunnews, 2019). Permasalahan dalam aspek pendanaan, saat ini masih banyak pelaku UMKM membutuhkan modal, tetapi mereka kesulitan dalam pengajuan kredit terutama para pedagang pasar tradisional (Radarjogja.jawapos.com, 2019). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman menilai kesadaran pelaku usaha di sektor mikro untuk mendaftarkan usahanya di pemerintah desa masih rendah sehingga banyak yang belum teregister (Kumparan.com, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kajian terkait dengan pemberdayaan UMKM sehingga dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

Menurut Aristianto (2018: 18) pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, tujuan pemberdayaan UMKM adalah: (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, (3) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori penumbuhan iklim usaha dalam rangka pemberdayaan UMKM. Alasan menggunakan teori tersebut karena relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Furqani (2017) penumbuhan iklim usaha dilakukan pada aspek: (a) pendanaan, (b) sarana dan prasarana, (c) informasi usaha, (d) kemitraan, (e) perizinan usaha, (f) kesempatan berusaha, (g) promosi dagang dan (h) dukungan kelembagaan. Masing-masing aspek tersebut dinilai menggunakan indikator berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Sleman. Pemberdayaan UMKM memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat berperan dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Metode

B.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. (Denzin & Lincoln, 2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, serta menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Dengan metode ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

B.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, yang beralamat di Jalan Parasamya, Beran Kidul, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 55511. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

B.3 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Informan penelitian yang dipilih harus mengetahui dan memahami tentang pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

Peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman khususnya dengan ketiga Kepala Seksi (Kasi) Bidang Usaha Mikro, yaitu Ibu Sri Wahyuni Budiningsih, S.E, M.Si., selaku Kasi Pengembangan Usaha Mikro, Ibu Sri Wara Nusandari, S.E., selaku Kasi Jaringan Usaha dan Kemitraan, Bapak Budiarto, S.E., selaku Kasi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan, serta dua pelaku UMKM yaitu Ibu Rini Puspitaningtiyas dan Ibu Deni Nurhayati.

Data yang diperoleh dari informan penelitian ini berupa program-program pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman meliputi aspek: (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan.

B.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara

dengan informan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa program-program pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman meliputi aspek: (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan.

Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Data UMKM, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, Profil Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, serta data mengenai program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

B.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2011) merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B.5.1 Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi secara terang-terangan dan tersamar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Observasi dalam penelitian ini digunakan

untuk mendapatkan gambaran mengenai program-program dan bentuk kegiatan penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program dan kegiatan pemberdayaan UMKM tersebut.

B.5.2 Teknik Wawancara

Definisi *interview* menurut Esterberg (2002) dalam (Kurniawan, 2017) sebagai berikut. "*A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication an joint construction of meaning about particular topic*". Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman dan pelaku UMKM sehingga wawancara lebih terbuka namun pertanyaan penelitian tetap fokus pada pedoman wawancara.

B.5.3 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2011) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang meliputi Data UMKM, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, Profil Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, serta data program-program dan kegiatan

pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

B.5.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama agar dapat membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing informan penelitian untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan, yaitu dari Ibu Sri Wahyuni Budiningsih, S.E, M.Si., Ibu Sri Wara Nusandari, S.E., Bapak Budiarto, S.E., serta dua pelaku UMKM yaitu Ibu Rini Puspitaningtyas dan Ibu Deni Nurhayati yang dibandingkan dengan data dokumen yang berkaitan dengan penumbuhan iklim usaha. Selain itu, peneliti juga membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi untuk memperoleh kesimpulan yang jelas terhadap penelitian yang telah dilakukan.

B.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman (1984) dalam (Zamili, 2013) bahwa langkah-langkah analisis data terdiri dari: (1) Pengumpulan data, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. (2) Reduksi data, yaitu data-data yang terkait dengan pemberdayaan UMKM direduksi

untuk digolongkan kedalam tiap indikator sehingga data dapat ditarik kesimpulan secara tepat. (3) Penyajian data, yaitu dengan mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga lebih mudah memahami mengenai pemberdayaan UMKM dan (4) Penarikan kesimpulan, yaitu membuat temuan atas penelitian berupa deskripsi dan gambaran objek yang jelas.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pemberdayaan UMKM melalui Penumbuhan Iklim Usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman

Pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman secara keseluruhan sudah berjalan optimal sesuai dengan teori penumbuhan iklim usaha menurut Furqani (2017) yang dinilai menggunakan indikator berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam melakukan penumbuhan iklim usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan.

1. Pendanaan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memberikan pinjaman lunak yaitu Dana Penguatan Modal (DPM) dengan kontribusi jasa sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan dari total Dana Penguatan Modal (DPM) sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha. Dalam mendukung hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman juga mengadakan sosialisasi tentang Dana Penguatan Modal (DPM) kepada para pelaku UMKM. Penyaluran Dana Penguatan Modal (DPM) untuk UMKM pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyaluran DPM bagi UMKM Tahun 2019

Tahap Penyaluran	Jumlah Pemohon	Rekomendasi
I	1 UMKM	30.000.000
II	2 UMKM	52.000.000
III	6 UMKM	125.000.000
IV	3 UMKM	28.000.000
V	4 UMKM	195.000.000
VI	3 UMKM	72.000.000
VII	4 UMKM	25.500.000
VIII	2 UMKM	15.000.000
IX	1 UMKM	10.000.000
Total	26 UMKM	552.500.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman juga mengadakan sosialisasi temu UMKM dengan penyalur permodalan, menyediakan konsultan pembiayaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang menjelaskan mengenai persyaratan, prosedur, dan pengajuan DPM. Selain itu juga bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan memberikan modal bagi pelaku UMKM seperti CSR dari PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Bank BRI (Persero). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek pendanaan sudah sangat baik.

2. Sarana dan prasarana

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman menyediakan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sleman/ *Center of Integrated Service (CIS)* yang terdiri 7 (tujuh) layanan yang dapat diakses secara gratis seperti konsultasi bisnis Koperasi dan UKM (KUKM), pendampingan, akses pemasaran melalui Sleman *Mart*, fasilitasi akses pembayaran,

pelatihan bisnis, jaringan, dan layanan pustaka *entrepreneur*.

Pada PLUT Sleman terdapat 5 (lima) konsultan yang akan mendampingi para pelaku UMKM seperti konsultan bidang kelembagaan, bidang sumber daya manusia, bidang pembiayaan, bidang pemasaran, dan bidang produksi. Masing-masing konsultan akan memberikan pendampingan dan solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek sarana dan prasarana sudah sangat baik.

3. Informasi usaha

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman menerapkan asasketerbukaan informasi publik yaitu dengan membentuk Sistem Satu Data UMKM Sleman. Dengan Sistem Satu Data ini, pendataan UMKM di Kabupaten Sleman diharapkan bisa lebih cepat, akurat dan *up to date* sesuai dengan kondisi UMKM yang ada. Pelaku UMKM menilai bahwa Sistem Satu Data UMKM ini sangat bagus karena dengan sistem ini dapat mengakses data UMKM secara lengkap dan terpadu.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman juga bekerja sama dengan berbagai pihak serta memanfaatkan media untuk menyampaikan informasi terkait dengan program, kebijakan, fasilitasi, serta menerapkan asas keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan UMKM secara vertikal maupun horizontal. Berbagai informasi tersebut disampaikan kepada UMKM melalui berbagai sosial media seperti Grup Forum Komunikasi (Forkom) UMKM di setiap kecamatan, *website, instagram, facebook*, dan *youtube*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Sleman pada aspek informasi usaha sudah sangat baik.

4. Kemitraan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman membentuk kerjasama kemitraan yaitu forum kemitraan dan forum komunikasi (Forkom) UMKM. Forum kemitraan UMKM merupakan forum yang dilaksanakan secara rutin yang mempertemukan antar pelaku UMKM agar terjadi kerjasama saling menguntungkan. Sedangkan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM merupakan forum tingkat kecamatan yang anggotanya adalah para pelaku usaha yang terdaftar di wilayah kecamatan tersebut. Pelaku UMKM menilai bahwa dengan adanya Forkom UMKM ini sangat bermanfaat yaitu bisa memperoleh informasi secara *up to date* dan dapat mengenal UMKM lain. Keanggotaan Forkom UMKM di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Data Anggota Forkom UMKM

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Cangkringan	60
2.	Pakem	80
3.	Turi	70
4.	Godean	76
5.	Moyudan	61
6.	Seyegan	53
7.	Sleman	52
8.	Gamping	84
9.	Kalasan	87
10.	Minggir	122
11.	Tempel	99
12.	Prambanan	60
13.	Ngemplak	372
14.	Mlati	49
15.	Berbah	58
16.	Depok	70
17.	Ngaglik	115
Jumlah		1568

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, 2020

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman juga melakukan Temu Usaha Kemitraan UMKM, yang merupakan pertemuan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha yang sudah *seattle*. Selain itu juga membuka *mindset* pelaku UMKM bahwa dengan bekerjasama antar pelaku UMKM dapat mendorong usaha semakin maju, menekankan kesetaraan bahwa kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, dan menanamkan etika bisnis kepada para pelaku UMKM bahwa kegiatan bisnis mencakup individu, perusahaan, dan konsumen. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek kemitraan sudah sangat baik.

5. Perizinan usaha

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memberikan kemudahan dalam pengurusan IUMK mandiri secara *online* melalui *One Single Submission (OSS)* dalam *website oss.go.id*. Melalui *OSS*, para pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan izin usaha secara mandiri dan dapat diakses secara gratis/ tidak dipungut biaya. Namun, apabila pelaku UMKM tidak bisa mendaftar secara mandiri melalui *OSS*, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman melalui PLUT akan mendampingi dalam pengurusan izin usaha. Dalam menunjang perizinan usaha melalui *OSS*, diadakan pelatihan secara gratis kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB sebagai salah satu syarat dalam mengurus perizinan usaha. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek perizinan usaha sudah sangat baik.

6. Kesempatan berusaha

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman menyediakan 3 tempat untuk berjualan bagi PKL, yaitu: (1) *Resto* PKL Mrican, Caturtunggal, Sleman, (2) *Food Court* Denggung, Jl. Gito Gati, Denggung, Tridadi, Sleman, dan (3) *Shelter* PKL Pangukan, Panglikan, Tridadi, Sleman. Dengan disediakannya tempat ini diharapkan dapat meningkatkan kemajuan UMKM. Selain itu, juga mengadakan kegiatan *brainstorming* kewirausahaan untuk mengajak generasi muda menjadi seorang *entrepreneur*. Dengan berkerjasama dengan pelaku usaha muda lulusan SMA/SMK sederajat yang telah menjadi seorang *entrepreneur* dan pelaku usaha yang sudah sukses, mengajak para generasi muda dan masyarakat agar mau berwirausaha. Seperti kegiatan *brainstorming* kewirausahaan yang sudah dilaksanakan di SMK N 1 Godean dan di SMKN 1 Seyegan dengan tema “*Think Big, Action Now*”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek kesempatan berusaha sudah cukup baik. Namun terdapat beberapa indikator yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman karena indikator tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

7. Promosi dagang

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi pameran di luar daerah agar produk UMKM Sleman dapat dikenal di daerah lain. Pameran di luar daerah membuka peluang kerjasama antar UMKM agar dapat saling bertukar informasi. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman selalu *up to date* dalam menginformasikan kegiatan promosi dagang kepada para pelaku UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Sleman juga selalu aktif dalam mengikutsertakan para pelaku UMKM dalam kegiatan pameran yang diadakan oleh pusat atau provinsi. Salah satu bentuk pameran yang diikuti Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman adalah pameran bertajuk Indonesia *Product Expo 2019* yang berlangsung di *Atrium Manado Town Square*, Manado, Sulawesi Utara. Selain itu juga mengadakan pameran dengan skala reguler seperti Pasar Srawung, *Sunday Morning*, dan Festival UKM Sembada. Semua kegiatan promosi dagang ini diadakan dengan mengandalkan pendanaan dari APBD Kabupaten Sleman maupun difasilitasi oleh pusat dan provinsi.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman juga melakukan promosi produk melalui kamar dagang di daerah lain yang terkoneksi dengan pasar luar negeri dan memberikan bantuan biaya sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk UMKM. Berdasarkan Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, jumlah pengajuan HAKI di Kabupaten Sleman tahun 2019 berjumlah 188 UMKM.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek promosi dagang sudah baik. Namun terdapat dua indikator yang belum dilaksanakan yaitu belum memperluas pendanaan untuk promosi produk di luar negeri dan belum memberikan insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk mereka.

8. Dukungan kelembagaan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman telah membentuk PLUT Sleman/ *Center of Integrated Service (CIS)* pada tahun 2019, yang didalamnya menyediakan beberapa layanan dan beberapa konsultan

bisnis yang akan mendampingi para pelaku UMKM yang memiliki permasalahan yang terkait dengan usahanya, baik dalam aspek pembiayaan, pemasaran, SDM produksi, legalitas, maupun kelembagaan.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman juga mengadakan beberapa kegiatan inkubator kewirausahaan, yaitu model pelatihan yang berbasis pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan dengan metode pembelajaran *in class*, *off class*, dan *study orientasi*. Salah satunya adalah Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (PUM) melalui kelas Inkubator Kewirausahaan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada aspek dukungan kelembagaan sudah sangat baik.

C.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM melalui Penumbuhan Iklim Usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman

Dalam melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

1. Faktor Pendukung

- a. Kesiapan Pelatihan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman yang sudah baik, dilihat dari jika dilihat dari awal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Bantuan modal. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memberikan bantuan Dana Penguatan Modal (DPM), memfasilitasi pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dari lembaga keuangan.

- c. Kebijakan pemerintah. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperkuat dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman meliputi:

a. Keterbatasan anggaran.

Bantuan pendanaan yang diberikan oleh Pemkab Sleman belum merata. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang Dana Penguatan Modal (DPM). Pelaku UMKM yang mendapatkan DPM adalah pelaku yang mengajukan proposal DPM ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman yang kemudian lolos seleksi. Mayoritas penerima bantuan pendanaan adalah usaha kelompok sehingga belum terbagi rata antara usaha perorangan dengan usaha kelompok.

Selain itu anggaran untuk sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Seperti anggaran program DAK dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi UMKM terbatas hanya untuk sesi materi. Seharusnya para pelaku UMKM dapat praktik langsung dan dapat melakukan studi banding dengan usaha yang sudah naik kelas sehingga memperoleh gambaran sebagai pembelajaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM).

Jika dilihat dari sisi penyelenggara, jumlah pelaksana masih kurang yaitu jumlah pelaksana program DAK bidang usaha mikro masih kurang karena hanya memiliki 1 (satu) pendamping. Namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh pendamping bidang koperasi atau fasilitator kewirausahaan dari seksi pengembangan usaha mikro.

Pelaksana pemberdayaan juga masih memerlukan pelatihan berkala, serta ada beberapa evaluasi terkait dengan konsultan yang ada di PLUT Sleman sampai saat ini masih terdapat konsultan yang kurang peka, bersikap pasif, dan terbatas hanya melayani pada perizinan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berbasis *One Single Submission* (OSS). Kehadiran konsultan juga tidak *full* dalam mengikuti pelatihan, seharusnya para konsultan ini dapat *sharing* dengan para peserta pelatihan di sela-sela waktu. Sedangkan, pelaku UMKM memiliki keterbatasan pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya. Dengan keterbatasan SDM, UMKM tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produknya.

D. Kesimpulan

Pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya indikator-indikator pada masing-masing aspeknya. Pada aspek pendanaan dengan memberikan Dana Penguatan Modal (DPM) dan mengadakan temu UMKM dengan penyalur permodalan. Pada aspek sarana dan prasarana dengan menyediakan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan 7 layanan.

Pada aspek informasi usaha dengan menerapkan asas keterbukaan informasi publik dan Sistem Satu Data UMKM. Pada aspek kemitraan dengan membentuk forum kemitraan dan forum komunikasi (Forkom) UMKM. Pada aspek perizinan usaha dengan memberikan kemudahan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui *One*

Single Submission (OSS). Pada aspek promosi dagang dengan memberikan fasilitasi pameran dan bantuan biaya sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada aspek dukungan kelembagaan dengan membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM (KUKM) Sleman dan melakukan *brainstorming* kewirausahaan. Faktor pendukung pemberdayaan UMKM meliputi kesiapan pelatihan UMKM, bantuan modal, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat pemberdayaan UMKM meliputi keterbatasan anggaran dan SDM.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman selalu menyebarkan informasi tentang DPM dan mengadakan sosialisasi agar semua masyarakat memahami dan nantinya dapat mengajukan DPM sebagai tambahan modal usaha. Selain itu juga akan mengalokasikan dana terkait dengan sarana dan prasarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Jika dilihat dari pelaku UMKM juga berharap program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM.

Oleh sebab itu, agar kualitas pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha semakin meningkat maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai bahan perbaikan. Pertama, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman harus melakukan sosialisasi secara berkala agar informasi dapat diperoleh secara merata kepada semua masyarakat, tidak hanya memberikan materi pelatihan tetapi harus mengadakan praktik dan studi banding dengan usaha yang sudah naik kelas sehingga memperoleh gambaran sebagai pembelajaran, harus pandai dalam mengelola

dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan skala prioritas, serta harus memberikan insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri bagi usahanya. Kedua, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM (KUKM) Sleman diharapkan dapat memperbaiki kualitas konsultan, aktif dalam mendampingi pelaku UMKM, melakukan pemantauan kinerja penyelenggara pelatihan satu dengan yang lainnya, serta harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal ketika ada pelatihan. Ketiga, para pelaku UMKM harus memiliki kesadaran yang lebih untuk mengikuti kegiatan pelatihan karena Pelatihan UMKM diadakan untuk melatih kemampuan para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Jogja.Tribunnews. (2019, November 5). *Pelaku Usaha di Sleman Banyak yang Belum Terdaftar*.
- krjogja.com. (2019). Mendorong UMKM Sleman Miliki Daya Saing. *Krjogja.Com*. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/mendorong-umkm-sleman-miliki-daya-saing/>
- Kumparan.com. (2019). *Ribuan UMKM di Yogyakarta Kesulitan Naik Kelas*. <https://kumparan.com/tugujogja/ribuan-umkm-di-yogyakarta-kesulitan-naik-kelas>
- Kurniawan, A. (2017). *Model Pengembangan Sosialisasi Sila Ke-4 Menggunakan Metode Debat Aktif Kombinasi Diskusi Pada Perkumpulan Pemuda Dukuh Babad*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2013). <https://www.google.com/search?q=Peraturan+Pemerintah+Republik+Indonesia+Nomor+17+Tahun+2013&oq=Peraturan+Pemerintah+Republik+Indonesia+Nomor+17+Tahun+2013&aqs=chrome..69i57j92j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Perkembangan UMKM pada Priode 1997-2003. (n.d.). <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembangan-umkm-pada-periode-1997--2013.html>
- Radarjogja.jawapos.com. (2019). *Perkuat UMKM, Cegah Bantuan Kredit Berpolo Rentenir*. <https://radarjogja.jawapos.com/2019/11/21/perkuat-umkm-cegah-bantuan-kredit-berpolo-rentenir>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi* (A. Nuryanto (Ed.); cetakan 10). Alfabeta.
- Suherningtyas, I. A. (2019). Analisis Spasial Persebaran Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Geografi*, 11(1), 101–107. <https://doi.org/10.24114/jg.v11i1.12233>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun->

2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-
Menengah.aspx

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.* (2014).
[https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.
pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf)

Zamili. (2013). Sketsa Penelitian Kualitatif
dalam Pendidikan. *Jurnal Lisan Al-Hal*,
7.